



## EVALUASI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Nora Ekaliana Hanafie

Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN, Kementerian Desa Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi, Indonesia

Correspondence: E-mail: [nora.ekaliana@yahoo.co.id](mailto:nora.ekaliana@yahoo.co.id)

### ABSTRACTS

This study was conducted to evaluate the optimization of the PSM after tasks enrichment, analyze constraints faced by PSM in carrying out the new duties, and formulate a strategy for optimizing PSM utilization. This study applied a quantitative approach with survey method through questionnaire and interview of 50 PSM respondents from a total of 444 PSM within the Ministry of Villages and Rural Areas. The results showed that the majority of PSM (78%) were not optimal in carrying out their duties. The main obstacles faced by the PSM mainly caused by the misplacement, the lack of competencies of community facilitation, commitment from the leaders and capacity building; in which below the standard to meet the credit score and career development. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JFPSM) or the Community Development Worker (CDWorker) is one of the functional positions which represents the presence of the state in encouraging the self sufficient and competitive Indonesian society. The study recommends: 1) the placement of PSM accordance to their function; 2) compensate the task according to their roles and functions to fulfill its credit score, 3) formulate the empowerment program proportionally; 4) commitment of the leader to support the duties of PSM.

**Keyword:** Community Development Worker, Optimization Evaluation Constraints, Roles of Optimization Evaluation.

### ARTICLE INFO

**Article History:**

*Submitted/Received 20 Oct 2019*

*First Revised 04 Nov 2019*

*Accepted 19 Jan 2020*

*First Available online 30 Jan 2020*

*Publication Date 01 April 2020*

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Proses pembangunan desa harus berkelanjutan yang melibatkan intervensi pihak luar dan aspirasi lokal yang bertujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Hasanah, 2019). UU No. 6/2014 juga memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunannya. Apabila pemerintah desa tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat maka kementerian terkait harus melakukan intervensi program dalam pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang memberikan kekuatan kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang bertujuan melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam segala hal (Craig, 2011; Sandekian, 2014).

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) mendapatkan mandat dan tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JFPSM), yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 58/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya. JFPSM adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pematapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Oleh karena itu PSM dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya termasuk dapat mengikuti perkembangan teknologi di era digital ini.

Pada penelitian sebelumnya, PSM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang bekerja di instansi pemerintah mempunyai perencanaan dalam pencapaian visi dan misi, dimana rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dituangkan dalam rencana strategi Kementerian. Dalam program/kegiatan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diukur, baik pencapaian program dan kegiatan, kemajuan dan kelemahannya, sehingga akan mendapatkan arah kebijakan dan ukuran dari langkah- langkah program kegiatan yang telah dicapai sebagai bahan perbaikan dari langkah- langkah program kegiatan yang telah dicapai sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang (Hervita dan Ekaputri, 2012). Studi lain menyampaikan bahwa kinerja PSM dalam pelaksanaan tugas sebagai penggerak swadaya masyarakat masih fokus pada pelatihan belum mencakup pendampingan dan penyuluhan

Di lain pihak untuk melaksanakan peran dan fungsinya PSM tidak hanya dituntut mempunyai tugas pelayanan akan tetapi keahlian sebagai ahli pemberdayaan masyarakat merupakan tugas utama dan menjadi unsur penilaian utama kinerja PSM yang berdampak pada kinerja organisasi. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya

diperlukan sebuah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai atas manfaat atau guna suatu kegiatan (Hidayat dan Asyafah, 2019). Evaluasi juga dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan untuk memberikan masukan terhadap hasil suatu program (Aygören dan Er, 2019). Evaluasi juga diperlukan untuk mengambil suatu keputusan menyangkut keberhasilannya suatu program (Mahmudi, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan evaluasi program yang bertujuan pengambilan keputusan, memperjelas pilihan, dan melakukan aksi dengan memberikan masukan kepada kebijakan. Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Optimalisasi juga diartikan sebagai tindakan mencapai hasil terbaik yang mungkin dalam keadaan tertentu dan menyebabkan tercapainya tujuan (Kumar et al., 2018). Sementara itu, menurut (Rahmawan, 2012) optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Penelitian ini fokus pada JFPSM yang ada di Kementerian Desa, PDTT, khususnya pada unsur utama, sub unsur pemberdayaan masyarakat yang meliputi: 1) pengembangan komitmen; 2) pengembangan kapasitas; dan 3) pemantapan kemandirian masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran, fungsi, dan kendala penggerak swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan PermenPAN dan RB No. 28 tahun 2018. Berdasarkan PermenPAN dan RB 28/2018 terindikasi setidaknya tiga potensi masalah bagi PSM untuk bekerja secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: pertama, kegiatan yang selama ini pelatihan bagi calon transmigran dan transmigran berkembang menjadi melatih, menyuluh, dan mendampingi seluruh masyarakat desa di Indonesia. Kedua, penempatan PSM berada di unit organisasi yang tidak memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiga, poin kedua akan menyulitkan PSM untuk mendapatkan angka kredit, yang dapat menghambat karir.

Berdasarkan tiga potensi permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: 1) bagaimana efektivitas optimalisasi PSM dalam menjalankan peran dan fungsi?; 2) Kendala yang dihadapi JFPSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?; dan (3) bagaimana strategi optimalisasi peran dan fungsi JFPSM?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis optimalisasi PSM dalam menjalankan peran dan fungsi; 2) menganalisis kendala yang dihadapi JFPSM dalam menjalankan peran dan fungsi; dan 3) Menyusun strategi optimalisasi peran dan fungsi PSM.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Penelitian survei ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data primer. Sampel dari populasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Metode pengumpulan data dilakukan terhadap responden melalui pengisian kuesioner. Berikut ini rincian sebaran PSM yang dirangkum pada **Tabel 1** Profil Penggerak Swadaya Masyarakat.

**Tabel 1.** Profil Penggerak Swadaya Masyarakat

No	Penempatan PSM	Jumlah
I	Daerah	232
	Kelurahan	2
	Kecamatan	19
	Kabupaten Kota	107
	Provinsi	104
	Pusat	212
II	Kementrian Desa PDTT	
	- Balai UPT	120
	- Ditjen Teknis	66
	- Puslatmas	9
	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17
<b>Total</b>		<b>444</b>

**Tabel 1** di atas merupakan Data dari Badan Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan dan Informasi (Balilatfo) Kemendesa PDTT per Agustus 2019, jumlah PSM di seluruh Indonesia sebanyak 444 orang, tersebar di Pusat dan Daerah. Sampel responden sebanyak 50 orang PSM yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Teknis, Sekretariat Jendral, Pusat Pelatihan Masyarakat dan di Balai-Balai Pelatihan Masyarakat. Pemilihan responden dilakukan secara simple random sampling karena sampel cenderung homogen

Hasil pengumpulan data, dianalisis secara deskriptif yang ditampilkan dalam grafik dan tabel berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan yaitu tingkat keoptimalan peran dan fungsi, kesesuaian antara uraian kegiatan dan tupoksi unit kerja, dan kendala optimalisasi peran dan fungsi dan kegiatan JFPSM. Analisis dibedakan atas jenjang JFPSM Pertama, Muda, dan Madya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 HASIL PENELITIAN

##### Profil PSM

Berdasarkan hasil survai, JFPSM yang bekerja di Kemendesa PDTT sebanyak 64% yang bekerja sebagai PSM selama 0-2 tahun, artinya sebagian besar merupakan PSM yang baru memasuki tugas sebagai PSM, termasuk di dalamnya yang melalui jalur insping. Sebanyak 20% mempunyai masa tugas 6-10 tahun, masa tugas 3-5 tahun sebanyak 12%, yang bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 4%. Dari populasi PSM yang bekerja, sebanyak 74% bertugas di Balai Pelatihan Masyarakat yang tersebar di 7 wilayah (Jakarta, Yogyakarta, Banjarmasin, Pekanbaru, Makassar, Ambon dan Papua Barat), artinya sebanyak 26% bekerja di Direktorat teknis, Kemendesa PDTT. Berdasarkan jenjang jabatan responden, terdiri dari PSM Ahli Pertama sebanyak 46%, PSM Ahli Muda sebanyak 24%, PSM Ahli Madya sebanyak 30%. Pada saat ini belum ada PSM yang menduduki jabatan Ahli Utama.

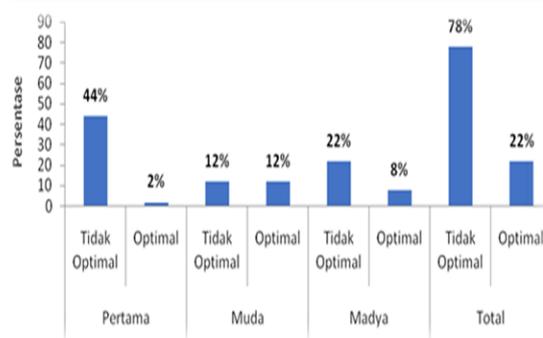
##### Evaluasi Optimalisasi Peran dan Fungsi

Optimalisasi peran dan fungsi PSM dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya agar peran dan fungsi PSM dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai lebih baik atau lebih sempurna (Rahmawan, 2012; Kumar et al.,

2018). Berikut deskripsi tentang tingkat keoptimalan implementasi kegiatan PSM, dan kendala optimalisasi.

### Tingkat Keoptimalan Peran dan Fungsi

Dari hasil survai, total sebanyak 78% JFPSM menyatakan peran dan fungsinya sebagai aktor pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Data menunjukkan bahwa ketidakefektifan ada pada JFPSM Ahli Pertama sebanyak 44%, JFPSM Ahli Muda 12%, dan JFPSM Ahli Madya 22% seperti ditampilkan pada **Gambar 1** berikut.



**Gambar 1.** Persentase PSM Menurut Tingkat Optimalisasi Peran dan Fungsi Berdasarkan Jenjang Jabatan

Dari **Gambar 1** di atas, dapat dilihat Ketidakefektifan pada JFPSM Ahli Pertama, diantaranya karena: 1) faktor senioritas, PSM pertama dianggap belum berpengalaman maka tugas yang seharusnya diemban, dilakukan juga oleh PSM Muda dan atau Madya; 2) faktor penempatan di bagian administrasi yang tidak ada kaitan dengan peran dan fungsinya; dan 3) pimpinan di unit dimana yang bersangkutan ditempatkan kurang paham terhadap peran dan fungsi JFPSM.

Demikian pula yang dialami oleh JFPSM Ahli Muda dan Madya terutama yang bertugas di Balai Pelatihan Masyarakat, mereka juga menghadapi kondisi dimana peran dan fungsinya tidak optimal. Hal tersebut ditandai dengan: 1) program kegiatan mayoritas pelatihan; dan 2) terkait dengan poin satu tersebut, hampir semua kegiatan pelatihan merupakan kelanjutan program bantuan fisik maupun teknis dari Direktorat teknis kepada masyarakat. Sehingga PSM tidak memiliki kesempatan tugasnya antara lain mengidentifikasi pergerakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun ada kegiatan identifikasi tetap terkait dengan bantuan yang telah atau akan diberikan kepada masyarakat.

Di lain pihak dengan adanya Dana Desa, Pemerintah Desa dan kelompok-kelompok masyarakat sangat membutuhkan pemberdayaan utamanya pendampingan, karena belum semua desa terjangkau oleh Pendamping Desa maupun belum mempunyai Pendamping Lokal Desa. Diakui oleh responden pergerakan masyarakat melalui pendampingan belum bisa dilaksanakan karena kegiatan tersebut relatif baru yang belum ada pedoman pelaksanaannya. Dengan belum adanya pedoman kegiatan pendampingan bagi JFPSM memunculkan perbedaan persepsi baik antar Balai Pelatihan maupun antar JFPSM terkait bagaimana melakukan pendampingan. Sebagian JFPSM menganggap pendampingan yang dilakukan oleh PSM berbeda dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa, padahal kegiatan pendampingan selain menjadi tolok ukur kinerja pergerakan secara menyeluruh, juga memiliki nilai angka kredit yang tinggi bagi JFPSM.

### Tingkat Kesesuaian Kegiatan PSM Ahli Pertama dengan Tupoksi Unit Kerja

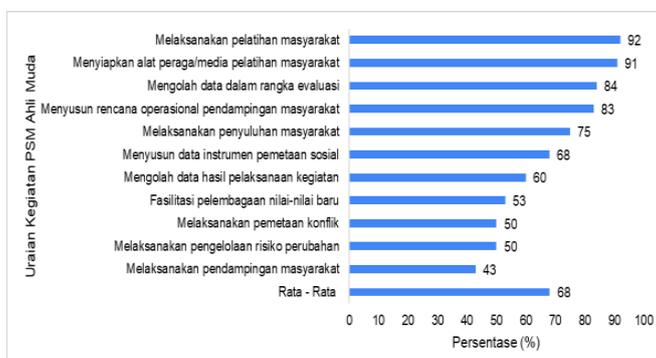
Mengacu pada Permenpan-RB 28/2018, PSM Ahli Pertama, dalam melaksanakan fungsinya diuraikan mencakup 35 kegiatan, dalam penelitian ini disarikan menjadi 11 kegiatan, sedangkan PSM Ahli Muda mencakup 49 kegiatan disarikan menjadi 11 kegiatan, dan PSM Ahli Madya 55 kegiatan disarikan menjadi 13 kegiatan. Dari 11 kegiatan PSM Ahli

Pertama tingkat kesesuaian dengan Tupoksi paling rendah adalah 35% dan paling tinggi adalah 78%. Dengan demikian rata-rata hanya 48% peran dan fungsinya sesuai dengan tupoksi unit kerja dimana PSM ditempatkan. Nilai yang paling rendah adalah kegiatan melaksanakan pengelolaan resiko perubahan, karena kegiatan ini tidak banyak membangun relasi sosial menunjukkan nilai paling tinggi yaitu 78%, artinya bahwa kegiatan membangun relasi sosial paling intens dilakukan PSM Ahli Pertama. Hal tersebut terjadi, karena pimpinan memberikan kesempatan dalam rangka menimba pengalaman dan sekaligus sebagai salah satu proses pembelajaran. Membangun relasi sosial merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melakukan perubahan secara terencana dengan menekankan pada partisipasi masyarakat yang terlihat pada **Gambar 2** berikut ini.



**Gambar 2.** Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan PSM Ahli Pertama dengan Tupoksi Unit Kerja

Pada **Gambar 2**, dari 11 kegiatan JFPSM Ahli muda nilai kesesuaian dengan Tupoksi paling rendah adalah 33% dan paling tinggi adalah 92%. Sehingga rata-rata 68% responden menyatakan peran dan fungsinya sesuai dengan tupoksi unit kerja dimana PSM ditempatkan. Berdasarkan angka persentase tersebut, bahwa representasi unit kerja responden ditengarai mayoritas berasal dari Balai-balai dimana kegiatan utamanya adalah kegiatan pelatihan 92%, kegiatan menyiapkan media pelatihan sebesar 91%. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan tergambar sangat rendah yakni sebesar 33%. seperti ditampilkan pada **Gambar 3** berikut ini.

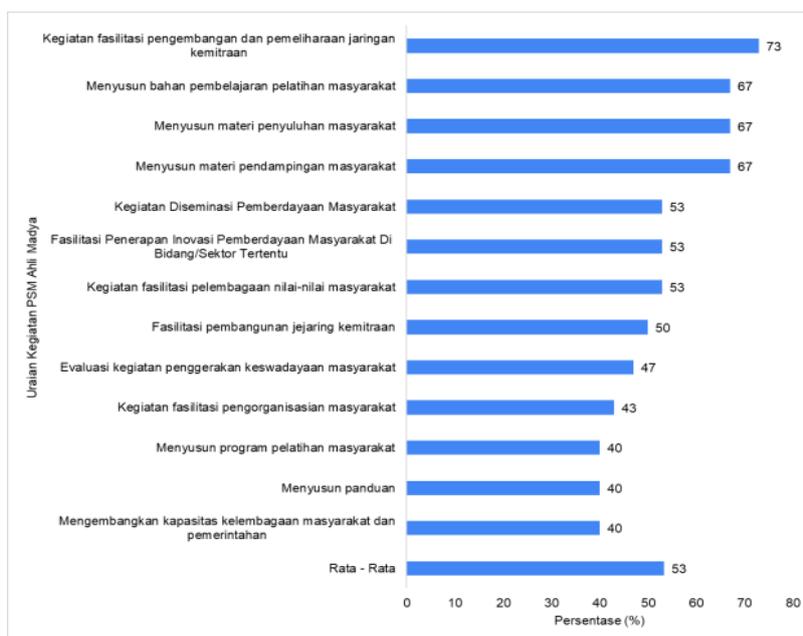


**Gambar 3.** Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan PSM Ahli Muda dengan Tupoksi Unit Kerja

Pada **Gambar 3**, terlihat rata-rata uraian kegiatan PSM Ahli Muda sebanyak 68 %. Dengan kegiatan yang paling banyak adalah melaksanakan pelatihan masyarakat sebesar 92% dan menyediakan alat peraga/media pelatihan masyarakat sebanyak 91%. Sementara kegiatan yang paling sedikit adalah kegiatan melaksanakan pedampingan masyarakat sebesar 43%.

Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya (Sutarto dan Mulyono, 2018), menyimpulkan bahwa peran pendamping desa diharapkan dapat mempercepat ketertinggalan dan kesejahteraan masyarakat. Namun karena keberadaan pendamping desa belum dapat melayani semua desa yang jumlahnya sangat besar, tentunya peran dan fungsi PSM dapat melengkapi sebagai mitra yang juga mempunyai fungsi pendampingan. Sangat disayangkan karena kegiatan “mendampingi” dapat dikatakan baru, maka kegiatan pendampingan yang merupakan salah satu proses percepatan penggerakan masyarakat, belum dijadikan program prioritas bagi Balai-Balai Pelatihan Masyarakat.

Uraian kegiatan PSM Ahli Madya terdiri dari 55 kegiatan, dalam penelitian ini disarikan menjadi 13 kegiatan, dimana kesesuaian dengan Tupoksi paling rendah adalah 40% dan paling tinggi adalah 73%. Rata-rata 53% responden menyatakan peran dan fungsinya sesuai dengan tupoksi unit kerja dimana PSM ditempatkan, yang ditampilkan pada **Gambar 4** di bawah ini.



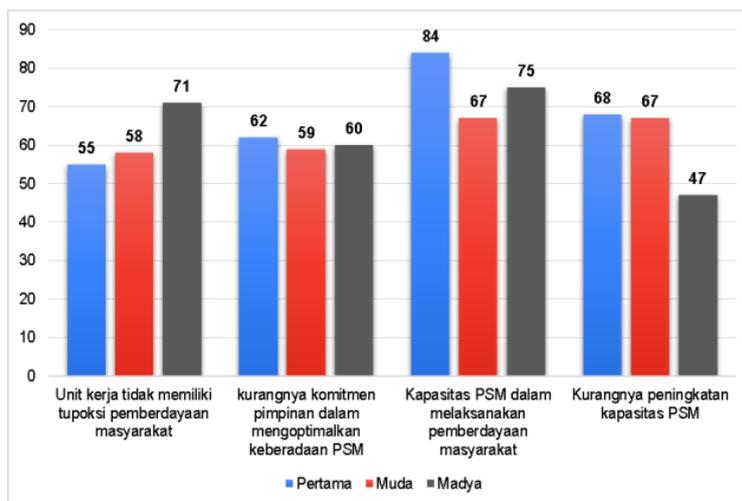
**Gambar 4.** Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan PSM Ahli Madya dengan Tupoksi Unit Kerja

Dari **Gambar 4**, dapat dilihat Kegiatan PSM Ahli Muda antara lain 1) fasilitasi pembangunan jejaring kemitraan sebesar 73%; 2) menyusun bahan ajar pelatihan masyarakat sebesar 67%; 3) menyusun materi penyuluhan masyarakat sebesar 67%; dan 4) melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau kebijakan penggerakan keswadayaan masyarakat sebesar 53%. Sedangkan menyusun materi pendampingan masyarakat masih rendah sebesar 43%. Dengan demikian menunjukkan kegiatan pendampingan yang sejatinya menjadi salah satu kegiatan dalam mengawal kemandirian masyarakat masih rendah di semua jenjang.

### 3.2. PEMBAHASAN PENELITIAN

#### Kendala Optimalisasi Peran dan Fungsi JFPSM

Hasil survei menunjukkan bahwa 78% pejabat fungsional PSM tidak optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Optimalisasi peran dan fungsi terkendala oleh: 1) unit kerja tidak memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat; 2) kurangnya komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan keberadaan PSM khususnya JF PSM Ahli Pertama; 3) kapasitas PSM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat; 4) kurangnya peningkatan kapasitas JFPSM disemua jenjang. Keempat kendala tersebut dijabarkan pada **Gambar 5** berikut ini.



**Gambar 5.** Persentase Kendala Optimalisasi Peran/Fungsi

Dari empat kendala pada **Gambar 5** yang dialami oleh JFPSM semua jenjang, Kendala pertama, tertinggi dialami oleh FPSM Madya (78%) yang ditempatkan di “Unit teknis yang tidak memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat”. Disayangkan kondisi ini kurang dipahami oleh pimpinan unitnya, sehingga pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan dapat dikonversikan dengan peran dan fungsinya tidak ada. Sedangkan kendala “kurangnya komitmen pimpinan” berdampak pada tidak optimalnya peran dan fungsi JFPSM, angka tertinggi dialami oleh JFPSM Ahli Pertama (62%), hal ini terjadi karena selain penempatan mereka tidak sesuai dengan peran dan fungsinya, juga karena kurangnya kepercayaan dari pimpinan unit yang bersangkutan. Sedangkan kendala terkait dengan “kapasitas JFPSM” dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor kompetensi, terutama dirasakan oleh PSM Ahli Pertama sebesar 84%. Kendala “kurangnya peningkatan kapasitas bagi JFPSM”, sebagaimana tergambar JFPSM jenjang Ahli Pertama sebesar 68%, jenjang Ahli Muda sebesar 67 % dan Ahli Madya 47%. Mayoritas responden menyatakan bahwa selama ini tidak ada peningkatan kapasitas terutama diklat penjenjangan bagi JFPSM.

#### Tidak Terpenuhinya Angka Kredit

Sebanyak 59,3% PSM Ahli Pertama, 58,4% PSM Ahli Muda, dan 59,4% PSM Ahli Madya menyatakan kesulitan dalam pemenuhan angka kredit dikarenakan: 1) penempatan di unit kerja yang tidak memiliki tupoksi pemberdayaan; 2) unit teknis yang memiliki tupoksi pemberdayaan belum mengimplementasikan semua unsur kegiatan sesuai dengan yang tertuang di dalam PermenPANRB No.28/208. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya peran dan fungsi PSM sehingga PSM terkendala dalam pengumpulan angka kredit; 3) PSM tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum maupun modul khususnya PSM yang

penempatannya di Balai Pelatihan Masyarakat padahal kegiatan tersebut mempunyai nilai kredit yang tinggi dibanding dengan kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis hasil penelitian, serta mengacu pada tujuan penelitian, penelitian ini menyimpulkan adanya ketidakefektifan peran dan fungsi JFPSM dalam melaksanakan peran dan fungsinya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa 78% responden menyatakan tidak optimal, ditandai dengan kegiatan PSM disemua jenjang yang tidak sesuai dengan tupoksi mencapai 44%.

Kendala yang dihadapi, oleh PSM semua jenjang adalah kapasitas PSM dalam melaksanakan pergerakan masyarakat, terutama kegiatan pendampingan yang sementara ini belum dilaksanakan karena belum adanya pedoman sebagai acuan baik bagi Lembaga maupun bagi PSM. Kendala lainnya adalah kurangnya pembinaan atau peningkatan kapasitas PSM secara berjenjang, sedangkan kedepan ini menjadi kebutuhan mutlak mengingat kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang harus melalui uji kompetensi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Standard dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Menyikapi ketidakefektifan dan kendala yang dihadapi oleh PSM maka Pimpinan yang berwenang seyogyanya menata kembali penempatan PSM sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan prinsip *the right man on the right place*. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Balai-Balai Pelatihan Masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para PSM dirumuskan sesuai dengan tupoksi dan berdasarkan kebutuhan di lapang artinya program pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan tidak hanya berupa pelatihan saja namun juga unsur penyuluhan dan pendampingan secara proporsional. Pembinaan bagi PSM yang ditempatkan di unit teknis yang tidak memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan cara memberikan penugasan di luar tugas rutinnnya yang berkaitan langsung dengan perolehan angka kredit sehingga tidak menghambat peningkatan karir yang bersangkutan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Desa tentang Standar dan Uji Kompetensi PSM maka peningkatan kapasitas PSM melalui pelatihan penjenjangan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, sehingga perlu segera diprogramkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aygören, F., & Er, K. O. (2019). New approach at evaluating the private schools' curriculum: I-CODE model. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 18(2), 58-81.
- Craig, G. (2011). Reflections on community development, community engagement and community capacity building. *Concept*, 2(2), 7-13.
- Hasanah, B. (2019). Tata kelola desa wisata Sukaratu berbasis kerakyatan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 108-121.
- Hervita, E. & Ekaputri, A.R. (2012). Studi deskriptif kinerja layanan pegawai penggerak swadaya masyarakat pada UPTD Balai Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. *The Manager Review Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 223-235.

- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep dasar evaluasi dan implikasinya dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159-181.
- Kumar, M., Kulkarni, A. J., & Satapathy, S. C. (2018). Socio evolution and learning optimization algorithm: A socio-inspired optimization methodology. *Future Generation Computer Systems*, 81, 252-272.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 111-125.
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 23-39.
- Sandekian, R., Chinowsky, P., & Amadei, B. (2014). Engineering for developing communities at the University of Colorado Boulder: A ten year retrospective. *International Journal for Service Learning in Engineering, Humanitarian Engineering and Social Entrepreneurship*, 9(Special Issue Fall 2014), 62-77.
- Sutarto, J. & Mulyono. (2018). Model Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal desa wisata mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), 27-40.